

EFEKTIVITAS PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Ermin Marikha

erminemma@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan FH UNS

Toto Susmono Hadi, Adi Sulistiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this research is determining the shape of a Guild Civil in the Act Number 2 of 2014 on the Amendments of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary and application the Act Number 2 of 2014 on the Amendments of Act Number 3 of 2004 concerning of Notary related to effectiveness in the implementation of the Notary Office. This research use the juridical empirical approach, through diagnostic, prescriptive and evaluative intended to obtain information about the cause of symptoms. This approach is needed in order to give advice on issues and asseses the measures undertaken by the Article 20 of the Act Number 2 of 2014 on the Amendments of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary. Based on result of research and discussion concluded that the implementation of Article 20 of the Act Number 2 of 2014 on the Amendments of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary of the shape Guild Civil is different from Guild Code that referred to in Article 1618 Book of the Law of Civil the joint venture in relation to liability mainly Notaries positions especially to maintain the confidentiality and independence. The Civil Alliance meaning is formed from the Joint Office of the formation based on the agreement of Notaries who are members of the Guild Civil and implementation requirements according to Regulation Minister of Justice and Human Right of the Republic of Indonesia Number M.HH.01.AH.02.12 Year 2010. However in practice that form ineffective cause of substance, structure and cultural factors.

Keywords : Effectiveness, Notary, Guild Civil.

Abstrak

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berlakunya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait dengan efektivitasnya dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yang berbentuk **diagnostik, preskriptif dan evaluatif** yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala, untuk mendapatkan saran-saran mengenai masalah-masalah dan menilai langkah-langkah yang dijalankan dengan adanya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk Persekutuan Perdata berbeda dengan Persekutuan Perdata yang dimaksud pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai usaha bersama terutama sehubungan dengan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu menjaga kerahasiaan dan kemandirian. Persekutuan Perdata yang dimaksud sesungguhnya berupa Kantor Bersama yang pembentukannya

mendasarkan pada perjanjian para Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata dan persyaratan pelaksanaannya menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak efektif penyebabnya adalah faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya.

Kata kunci : Efektivitas, Notaris, Persekutuan Perdata.

A. Pendahuluan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dimungkinkan para Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan ketentuan mengenai bentuk badan usaha bagi Notaris. Ketentuan tentang Perserikatan Perdata Notaris dijabarkan lebih detil di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan. (Habib Adjie, 2015 : 86)

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk badan usaha bagi Notaris ini diundangkan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dengan nama perkumpulan yang berbeda.

Dari kedua pasal tersebut terdapat perbedaan, dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.

Perbedaan selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ketentuan lebih lanjut untuk menjalankan Persekutuan Perdata diatur dengan Peraturan Menteri, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ketentuan tersebut dihapus. (Habib Adjie, 2015 : 142)

Larangan adanya Persekutuan atau Perserikatan Perdata Notaris dengan alasan, bahwa persekutuan

sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena itu mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendaki, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang Notaris. Selain daripada itu adanya persekutuan diantara notaris-notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para Notaris. (G.H.S. Lumban Tobing, 1996 : 107)

Notaris yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, namun diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk melaksanakan jabatannya dalam suatu persekutuan perdata. Kemudian untuk mengetahui hal-hal yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang tergabung di dalam persekutuan perdata, berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas akan diuraikan bentuk Persekutuan Perdata menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan berlakunya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yang berbentuk diagnostik, preskriptif dan evaluatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala, untuk mendapatkan saran-saran mengenai masalah-masalah dan menilai langkah-langkah yang dijalankan dengan adanya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Tinjauan Pasal 20 Mengenai Perserikatan Perdata Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Persekutuan Perdata Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, bentuk perserikatan perdata sebagai mana dimaksud diatur oleh para Notaris dengan perjanjian yang dibuat oleh para Notaris yang tergabung di dalam perserikatan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para Notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata. Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam ketentuan Pasal 20 tersebut, adalah "Kantor Bersama Notaris". (Habib Adjie, 2008 : 97)

Kantor Bersama Notaris dapat diartikan beberapa orang Notaris bergabung dalam sebuah perserikatan untuk bersama-sama menjalankan tugas jabatan Notaris dalam satu kantor Notaris dengan memakai nama salah seorang serikatnya sebagai identitas Kantor Bersama tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Namun tidak diberikan definisi mengenai Persekutuan perdata yang dimaksud.

Bentuk Persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa bentuk persekutuan perdata, yang secara umum adalah sebagai mana diatur dalam KUH Perdata dan KUHD.

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama dalam persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan. Menjalankan Perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) disebutkan definisi Notaris yaitu "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya".

Persekutuan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dalam hal ini makna kemandirian Notaris adalah sebagai seorang Pejabat Umum. Istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada

atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada atasannya (*depend on*). Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Dalam independensi ini ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. *Structural Independen*, yaitu independen secara kelembagaan (*institusional*) yang dalam bagan struktur (*organigram*) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang dimaksud Pemerintah dalam hal ini adalah menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah.

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b) Tidak memihak siapapun (*impartial*);

Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

2. *Functional Independen*, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tugas, wewenang dan jabatan Notaris.

Disebut dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. *Financial Independen*, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun juga.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. (Habib Adjie, 2008 : 43)

Ketentuan independensi ini, diatur dalam kewajiban Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dilihat dari prinsip-prinsip Independensi tersebut, yang harus diperhatikan Notaris tidak hanya memiliki hubungan *structural independen* dengan Kementrian Hukum dan HAM yang mengangkat Notaris, tetapi juga *functional independen* antar sesama teman sejawat Notaris dan *financial independen* dalam pengelolaan keuangan.

Functional Independen dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib menjaga kerahasiaan akta dan dokumen pendukung. Disamping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan

antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diterangkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam prinsip *functional independen* ini, Notaris juga memiliki kewajiban untuk membuat alat bukti yang diinginkan oleh subyek hukum sebagai penghadap untuk suatu tindakan hukum para pihak yang menghadap secara mandiri, dalam artian tanpa melibatkan teman sejawatnya dalam bentuk akta Notaris.

Meskipun Notaris bergabung dalam satu persekutuan perdata, akan tetapi hanya Notaris yang membuat akta yang membubuhkan tanda tangan pada akta. Baik pada Minuta dan Salinan, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Tanda tangan tersebut hanya soal administrasi saja, namun teman sejawat Notaris tidak dapat mempengaruhi terhadap wewenang sejawat Notaris. Apalagi, apabila ada aturan persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing Notaris di persekutuan tersebut, tidak boleh mempengaruhi kewenangan Notaris.

Tidak kalah penting, Notaris juga terikat dalam hal *financial independent* yang digaris bawahi mengenai hal ini dalam melaksanakan jabatannya, Notaris

memang berhak mendapatkan honor. Namun, berdasarkan prinsip ini Notaris dilarang mendapatkan pendapatan dari pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan Jabatan. Masing-masing Notaris yang menjadi anggota persekutuan perdata Notaris berdiri sendiri dalam menerima honorarium.

2. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Unsur-unsur utama sistem hukum ada 3 (tiga), yakni *substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya). Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya. (Soerjono Soekanto, 2012 : 21)

a. Faktor Substansi

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Diperkenalkannya Notaris melaksanakan jabatannya dalam bentuk badan usaha pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 20 ayat (1) mengenai Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata memiliki tujuan sebagai perserikatan perdata Notaris tidak lebih kepada kantor bersama sedangkan dan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dirubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata tidak ada ketentuan yang mengacu kepada kantor bersama.

Pembentuk Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah membuat suatu aturan yang bertentangan antara batang tubuh dan penjelasan. Dimana dalam batang tubuh Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan perserikatan perdata, yang semestinya harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi dalam penjelasannya mengatakan maksud dari perserikatan perdata tersebut hanya berupa kantor bersama yang kemudian ketentuan mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Tentunya juga telah terjadi penambahan norma baru yang dimana antara batang tubuh dan penjelasan mempunyai konsep hukum yang berbeda. Dengan demikian, penjelasan semestinya sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Agar tidak bertentangan antara batang tubuh dan penjelasan

b. Faktor Struktur

Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Mandiri dalam membuat akta

Setiap anggota persekutuan perdata bertindak dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Artinya jika seorang anggota membuat perikatan dan dari perikatan itu timbul kewajiban, maka anggota yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban itu. Terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidak adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya.

b) Mandiri dalam bekerja

Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya maka tidak dapat mempertahankan prinsip kemandiriannya yaitu dalam fungsinya

karena akan banyak melibatkan sekutunya dalam bekerja. Selain itu, kemandirian Notaris dalam finansial juga tidak dapat dipertahankan karena sesuai dengan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan cara pembagian keuntungan dan kerugian karena prinsip dalam suatu persekutuan perdata adalah membagi keuntungan bersama. Sementara dalam dunia kenotariatan tidak mengenal pembagian cara pembagian tersebut.

c. Faktor Budaya

Budaya Hukum atau Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, maka keberadaan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut menjadi kontradiktif, karena dengan keberadaan Notaris secara bersama-sama dalam persekutuan perdata, akan sangat sulit untuk menjalankan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

diperoleh guna pembuatan akta. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal itu, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mulai dengan teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Simpulan

Perubahan terhadap Pasal 20, dari perserikatan perdata (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) menjadi persekutuan perdata (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) bukan berarti bahwa seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan bentuk badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya karena Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri, tidak berpihak dan menjaga kerahasiaan, maka Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikatakan tidak efektif karena faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya tidak dapat dijalankan dengan baik.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya uji sinkronisasi, konsistensi dan penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan

Pasal 20 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Perlu dievaluasi lebih lanjut penting atau tidaknya keberadaan Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Daftar Pustaka

- Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni
- Eleanora Maria Pangkahila. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Rahasia Jabatan Di Daerah Hukumnya. *Jurnal*. Udayana : http://www.slideshare.net/notariat_unud/junal-mkn-unud-april-2012
- Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama
- G.H.S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Keempat. Jakarta : Erlangga
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama
- _____. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama
- _____. 2011. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*. Semarang : Pustaka Zaman
- _____. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung : Pustaka Zaman
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor*

- 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : Refika Aditama
- Hans Kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung : Nusa Media
- Hartanti Sulihandari Dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta : Dunia Cerdas
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press
- Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- HMN. Purwosutjipto. 1998. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum*. Jakarta : Djambatan
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Michael Josef Widijatmoko, Sunarto, Wahyu Nugroho. 2012. *Teknik Pembuatan Akta Otentik (Akta Notaris & Akta PPAT)*. Surakarta : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Grup
- R. A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Rr. Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta : Andi
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang : Bayumedia
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta : UI Press
- _____. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- _____. 2008. *Pedoman Pembimbingan Tesis & Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis*. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS
- _____. 2012. *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cetakan 1. Surakarta : UNS Press
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Tan Thong Kie. 2013. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Ord. Stbl.
1860 No. 3

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.
AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan
Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk
Perserikatan Perdata